

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya (Bursa Efek Indonesia, 2018). Bursa efek yang terdapat di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan dalam menghitung variabel ukuran perusahaan membutuhkan nilai total aktiva, sedangkan total aktiva di perusahaan keuangan tidak mencerminkan keadaan kekayaan yang sesungguhnya dari perusahaan tersebut, dikarenakan nilai total aktiva perusahaan keuangan lebih besar berasal dari kredit yang dipinjamkan ke pihak ketiga. Contohnya, pada laporan keuangan milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) pada tahun 2018 memiliki total aset sebesar Rp1.296.898.292.000.000. Dari total aktiva tersebut, sejumlah 63,23% berasal dari kredit yang dipinjamkan kepada pihak ketiga dan sisanya berasal dari aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan, kredit yang dipinjamkan kepada pihak ketiga dapat berasal dari uang tabungan atau jasa lain yang berasal dari pihak nasabah di bank tersebut. Maka, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sektor keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dibandingkan dengan perusahaan sektor non-keuangan. Kemudian terdapat kewajiban bagi emiten untuk melakukan publikasi atas laporan keuangan secara berkala, sehingga data yang tersedia lengkap dan mudah untuk di akses.

Selain itu, data yang dihimpun dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah di publikasikan kepada publik.

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tumbuh berkelanjutan. Akan tetapi pandangan tersebut kian bergeser kearah yang lebih luas lagi, dimana perusahaan juga dituntut mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk melakukan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Laporan keberlanjutan kian menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan. Menurut data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 49 perusahaan dari 479 perusahaan atau hanya 10,22% yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan, sektor infrastrukturnya, utilitas, dan transformasi, dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Saat ini perusahaan dituntut oleh semua pihak dari *stakeholder*, investor, kreditor, karyawan, *supplier*, konsumen, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam kegiatan yang berhubungan dengan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian *profit*, namun juga fokus pada *people* dan

planet atau sering disebut dengan *triple bottom line* (Adhipradana, 2014). Hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan membantu perusahaan untuk memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal perusahaan. Ketika citra perusahaan dianggap baik, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang bermanfaat bagi keberlanjutan perusahaan.

Laporan keberlanjutan menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada *stakeholder*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), *sustainability reporting* atau laporan keberlanjutan merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel. Dalam pedoman *Global Reporting Initiative* terdapat tiga komponen utama pengungkapan yang memperlihatkan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar *disclosure*. Dari tiga dimensi tersebut diperluas menjadi enam dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Laporan keberlanjutan di Indonesia umumnya menggunakan indikator dalam standar pengungkapan yang ada dalam *Global Reporting Initiative G4* (GRI G4) yang tercantum dalam *Sustainability Reporting Guidelines*. Versi terbaru dari pedoman *Global Reporting Initiative* adalah G4 (*fourth generation/generasi keempat*), yang dikembangkan pada tahun 2013, berisi tentang prinsip pelaporan, standar pengungkapan, dan cara penerapan aturan *Global Reporting Initiative* untuk pembuatan laporan keberlanjutan secara umum. Standar GRI G4 mewakili praktik terbaik secara global dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial kepada publik.

Faktanya terjadi beberapa fenomena yang berkaitan dengan isu keberlanjutan dari perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu: Pada tahun 2014, sejumlah warga Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang tergabung dalam Forum Tanjung Enim Menggugat, memprotes perluasan aktivitas tambang PT Bukit Asam Tbk. Rekomendasi ini

mendapatkan dukungan dari Forum Masyarakat Pemantau Batubara (For Batu). Sejumlah warga menilai aktivitas penambangan PT Bukit Asam Tbk yang telah mendekati pemukiman penduduk, sudah meresahkan keberlangsungan masyarakat Tanjung Enim dan berdampak bagi lingkungan lebih besar dibandingkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. (Wijaya, 2014).

Pada tahun 2015, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Tbk Agung Wiharto menyampaikan akan membenahi teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, apabila pembangunan pabrik pengepakan semen dan dermaga yang sedang dikerjakan di kawasan tersebut merusak lingkungan. PT Semen Indonesia Tbk dilaporkan sejumlah aktivis lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Balikpapan karena merusak mangrove (Kusbiantoro, 2015).

Pada tahun 2016, Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (WAHLI) Jambi menyatakan, menolak semua bentuk aktivitas PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Merangin maupun di Sarolangun, Jambi. Penolakan dilakukan setelah timbul kekhawatir ketika tambang beroperasi menimbulkan banjir, longsor mengancam 20 desa di dua kabupaten, kemudian mengancam lima sungai besar dan 95 anak sungai di Kabupaten Sarolangun, Jambi, telah tercemar. Hal itu diduga akibat aktivitas pertambangan PT Aneka Tambang Tbk (Diana, 2016).

Menurut data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan akhir tahun 2016 terdapat 49 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Berikut adalah data mengenai jumlah emiten berdasarkan sektor yang menerbitkan laporan keberlanjutan:

**Tabel 1.1 Jumlah Emiten yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan
Tahun 2016**

No.	Sektor	Jumlah perusahaan	Menerbitkan Laporan Keberlanjutan	Persentase (%)
1.	Pertanian	21	3	14,28%
2.	Pertambangan	39	10	25,54%

(Bersambung)

(Sambungan)

3.	Industri Dasar dan Kimia	62	4	6,45%
4.	Aneka Industri	34	3	8,82%
5.	Industri Barang Konsumsi	35	2	5,71%
6.	Properti, Real Estat dan Konstruksi Bangunan	21	6	28,57%
7.	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	54	7	12,96%
8.	Perdagangan, Jasa dan Investasi	121	0	0%
9.	Keuangan	92	14	15,21%
Total		479	49	10,22%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017), Data yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1, Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 479, dikurangi dengan jumlah perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan sebanyak 49. Sehingga total perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan hingga akhir tahun 2016 berjumlah 430 perusahaan. Dalam sektor pertanian dari total 21 perusahaan hanya ada tiga perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor pertambangan dari total 39 perusahaan hanya ada 10 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor industri dasar dan kimia dari total 62 perusahaan hanya ada empat perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor aneka industri dari total 34 perusahaan hanya ada tiga perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor industri barang konsumsi dari total 35 perusahaan hanya ada dua yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan dari total 21 perusahaan hanya ada enam yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari total 54 perusahaan hanya ada tujuh perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor perdagangan, jasa, dan investasi dari total 121 perusahaan tidak ada yang

menerbitkan laporan keberlanjutan. Sektor keuangan dari total 92 perusahaan hanya ada 14 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan.

Dengan adanya fenomena di atas, memberikan pelajaran bagi perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial dan melakukan pencegahan sebelum terjadi kerusakan. Laporan keberlanjutan memiliki pedoman dalam pembuatannya yaitu mengacu pada indeks GRI G4. Pedoman ini mengacu berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan oleh para pemangku kepentingan. Luas informasi dari Laporan keberlanjutan tentunya dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit.

Laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban *stakeholder* terhadap kinerja organisasi. Laporan tersebut menggambarkan informasi terkait kondisi ekonomi, lingkungan hidup dan dampak sosial masyarakat suatu industri atau perusahaan dan bukan merupakan laporan *corporate social responsibility* saja. Sebuah laporan keberlanjutan memberikan representatif yang seimbang dan berkesinambungan termasuk kontribusinya (Muliaman dan Maftuchah, 2015:258). Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan pada pedoman *sustainability reporting guidelines* yang diterbitkan oleh (*Global Reporting Initiative*). *Global Reporting Initiative* merupakan lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap keberlanjutan aktivitas bisnis dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Global Reporting Initiative* telah menyediakan kerangka dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang umumnya digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia dalam menyusun laporan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan ini dapat menjadi suatu upaya perusahaan dalam menggambarkan tingkat kepeduliannya terhadap masyarakat. Selain itu pengungkapan laporan keberlanjutan ini dapat menjembatani kebutuhan *stakeholders* dalam memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan.

Ukuran perusahaan menurut Kusuma (2014) adalah penggambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan,

rata-rata total penjualan, dan rata-rata total asset. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total aktiva sebagai indikator perhitungan, karena total aktiva dapat menggambarkan bagaimana kondisi suatu perusahaan dan relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan total penjualan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil karena perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan tanggung jawab sosial. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutannya.

Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Barung et al. (2018); Afsari et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Safitri (2017); Adila dan Syofyan (2016); Sari dan Marsono (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan adalah *return on asset*. Menurut Keown et al. (2008), *return on asset* adalah pengembalian atas aset-aset yang menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total aset. Kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Dengan peningkatan profitabilitas maka, perusahaan memiliki dana yang lebih untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Hal ini berimbas pada semakin banyaknya informasi yang dapat diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial (Munif, 2010).

Penelitian mengenai hubungan antara *return on asset* dan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Fitri dan Yuliandari (2018); Rahman dan Safitri (2017); Adila dan Syofyan (2016) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Adhipradana dan Daljono (2014) yang menyatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Komisaris independen menurut Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Menurut Haniffa dan Cooke (2002) apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Peningkatan kualitas pengungkapan dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara mengungkapkan laporan tambahan seperti laporan keberlanjutan. Jika citra perusahaan meningkat, maka hal tersebut menandakan pengawasan yang baik dari dewan komisaris independen dan kerja manajemen yang efektif.

Penelitian mengenai hubungan antara komisaris independen dan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Barung et al. (2018); Awalia et al. (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adila dan Syofyan (2016); Aniktia dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Kepemilikan saham publik (*public shareholding*) adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Rifqiyah dalam Hamdani et al. (2017) pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi yang memiliki saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Persentase kepemilikan saham akan menentukan struktur kepemilikan di perusahaan. Semakin

besar kepemilikan saham publik maka, semakin tinggi kontrol publik yang menjadi tanggungjawab perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara kepemilikan saham publik dan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Lamia et al. (2014); menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani et al. (2017); Indraswari dan Mimba (2017); Oktariani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santoso et al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan.

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Komite Audit baik secara internal maupun dengan berbagai pihak untuk kemajuan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris agar *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini serupa dengan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) serta Sari dan Marsono (2013) yaitu dengan jumlah rapat dalam setahun. Menurut Suryono dan Prastiwi (2011) kualitas komite audit dapat dipengaruhi oleh frekuensi pertemuan yang diadakan. Semakin sering melakukan kegiatan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik dan menjalankan tugasnya dengan efektif.

Penelitian mengenai hubungan antara jumlah rapat komite audit dan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh Rizki et al. (2014) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan. sedang penelitian yang dilakukan oleh Leksono (2018) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap laporan keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap laporan keberlanjutan. Keterbatasan penelitian terdahulu serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antar variabel tersebut menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu

peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Publik, dan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Studi Kasus pada Perusahaan non-keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi keinginan *stakeholder*. Namun, ternyata bukan hanya dengan *profit* perusahaan dapat tetap *going concern*. Dalam kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan *profit* saja, namun juga *people* dan *planet*. Hal ini disebabkan *people* dan *planet* juga terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilalaikan oleh perusahaan. Kewajiban untuk menerbitkan laporan keberlanjutan sudah tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Otoritas Jasa Keuangan pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia masih belum direalisasikan dengan baik. Pada akhir tahun 2016, hanya terdapat 49 perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan laporan keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan melalui bisnis yang berkelanjutan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, dalam penelitian ini akan dilihat apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit baik secara simultan dan parsial terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, jumlah rapat komite audit dan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
2. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh secara simultan terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - b. Profitabilitas terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - c. Komisaris independen terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - d. Kepemilikan saham publik terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?
 - e. Jumlah rapat komite audit terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, jumlah rapat komite audit dan laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh secara simultan terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Ukuran perusahaan terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018;
 - b. Profitabilitas terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018;
 - c. Komisaris Independen terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018;
 - d. Kepemilikan saham publik terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018;
 - e. Jumlah rapat komite audit terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018;

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang serta dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai laporan keberlanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk pemecahan kasus dan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian sejenis selanjutnya.

1.6.2. Aspek Praktis

Dari segi aspek praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam pembuatan keputusan, sehingga dapat meningkatkan program tanggung jawab

sosial dan lingkungannya serta dapat meningkatkan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan keberlanjutan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya program tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan investasi di masa yang akan datang.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang telah dipublikasikan melalui situs Bursa Efek Indonesia, dan situs korporat masing-masing perusahaan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dengan melakukan pengolahan data terhadap laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.7.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan saham publik, dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah laporan keberlanjutan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian.

BAB III – METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai karakteristik objek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V – PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.